

Berita Klaten

Beranda > Opini >

Pilkada Serentak 2024: Endorsement Tokoh Nasional Dan Meningkatnya Apatisme Pemilih



Warta Kita

November 29, 2024


**WartaKita.org**
Setia Mengabarkan Kebajikan

Warga Kabupaten Klaten saat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada yang berlangsung pada 27 November 2024 lalu.

PILKADA serentak 2024 yang berlangsung di 545 daerah pada 27 November 2024 lalu menyisakan banyak catatan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat partisipasi pemilih jika dibandingkan dengan Pemilu Presiden.

Di beberapa daerah, angka partisipasi pemilih bahkan tidak mencapai target. Ini mencerminkan apatisme yang semakin mengkhawatirkan dalam demokrasi lokal.

Ironisnya, Pilkada kali ini juga ditandai dengan keterlibatan besar tokoh nasional seperti Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo, yang secara terang-terangan memberikan dukungan kepada sejumlah pasangan calon kepala daerah.

Dukungan mereka seharusnya mampu meningkatkan antusiasme pemilih. Tetapi fakta di lapangan  menunjukkan sebaliknya. Apakah ini berarti strategi *endorsement* tokoh nasional tidak efektif, atau justru

kontraproduktif?

Dalam teori, *endorsement* tokoh nasional diharapkan bisa memberikan efek domino yang positif. Popularitas seorang tokoh besar diyakini mampu menarik perhatian masyarakat terhadap kandidat yang didukungnya. Namun, dalam praktiknya, fenomena ini justru memperlihatkan sisi gelap demokrasi lokal.

Endorsement ini membuat Pilkada lebih mirip perpanjangan politik nasional, mengaburkan fokus pada kebutuhan daerah. Situasi ini juga mengurangi perhatian pada isu-isu spesifik yang sebenarnya menjadi perhatian utama masyarakat di tingkat lokal, karena kandidat lebih banyak terikat pada narasi besar yang dirancang oleh tokoh nasional. Selain itu, fenomena ini memarginalkan kandidat independen yang tidak memiliki koneksi politik kuat di tingkat nasional.

Meskipun mereka mungkin memiliki kapasitas yang lebih baik untuk memimpin daerah, mereka sering kali kalah pamor karena tidak mendapatkan “stempel kualitas” dari tokoh nasional. Hal ini membatasi pilihan masyarakat dan mengurangi keberagaman kandidat yang seharusnya menjadi kekuatan demokrasi lokal.

Namun, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah dampaknya terhadap generasi muda, yang seharusnya menjadi penggerak utama demokrasi. Sebagai kelompok yang aktif di media sosial, generasi muda kerap menjadi target utama kampanye politik yang didukung *endorsement* tokoh nasional.

Media sosial menjadi arena di mana narasi tentang kandidat dibentuk. Namun narasi ini sering kali lebih mengedepankan siapa yang mendukung mereka daripada apa yang mereka tawarkan untuk daerah. Kecenderungan ini menciptakan pemilih yang kurang kritis, yang memilih berdasarkan figur populer daripada mengevaluasi visi dan misi kandidat. Fenomena ini tidak hanya merusak kualitas demokrasi lokal, tetapi juga membahayakan independensi generasi muda sebagai agen perubahan.

Pilkada seharusnya menjadi ajang untuk memilih pemimpin yang memahami karakteristik unik dan kebutuhan spesifik daerah masing-masing. Tetapi, keterlibatan Prabowo dan Jokowi menciptakan dinamika “kubu-kubuan” yang memperburuk polarisasi sosial yang sudah terasa di tingkat nasional.

Hal ini menyebabkan banyak pemilih merasa lelah dengan persaingan politik yang terus berulang, dan akhirnya enggan terlibat. Apatisme pemilih yang terlihat jelas dalam rendahnya angka partisipasi adalah bukti bahwa masyarakat merasa suara mereka tidak berdaya di tengah dominasi politik nasional.

Untuk mengatasi apatisme pemilih dan memperkuat demokrasi lokal, langkah strategis yang lebih mendalam perlu dirancang dan diterapkan. Hal utama yang harus menjadi prioritas adalah membangun kesadaran politik di kalangan generasi muda.

Pendidikan politik tidak cukup hanya berfokus pada mekanisme pemilu, tetapi juga harus menanamkan pemahaman kritis tentang bagaimana proses politik lokal memengaruhi kehidupan sehari-hari. Edukasi ini dapat dilakukan melalui integrasi kurikulum sekolah, diskusi publik, hingga pelatihan kepemimpinan di tingkat komunitas yang mendorong keterlibatan aktif dalam proses politik.

Selain itu, penting untuk menciptakan iklim politik lokal yang bebas dari dominasi tokoh nasional. Pilkada harus dirancang agar benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas daerah.



Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memperketat regulasi terkait keterlibatan tokoh nasional dalam kampanye lokal, sehingga kandidat dapat lebih fokus menyampaikan program kerja yang relevan dengan wilayah yang mereka pimpin.

Independensi politik lokal ini juga akan membantu masyarakat untuk lebih mengenal kandidat secara langsung, tanpa terdistorsi oleh citra yang dikaitkan dengan figur-figur besar di tingkat nasional.

Media sosial, yang menjadi arena utama bagi generasi muda untuk mendapatkan informasi, harus digunakan dengan lebih bertanggung jawab. Pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil perlu berkolaborasi untuk menciptakan konten-konten yang informatif, netral, dan berbasis fakta tentang kandidat serta isu-isu lokal.

Platform digital juga harus diperkuat sebagai ruang diskusi yang sehat, di mana masyarakat bisa berbagi pandangan tanpa tekanan dari narasi yang terlalu partisan. Dengan pendekatan ini, media sosial tidak hanya menjadi alat kampanye, tetapi juga menjadi sarana edukasi politik yang efektif.

Upaya-upaya ini harus diiringi dengan kebijakan yang mendorong transparansi dalam penyelenggaraan Pilkada. Memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memantau proses pemilu, seperti membuka kanal pengawasan publik, dapat membangun kembali kepercayaan terhadap sistem demokrasi.

Dengan kombinasi pendidikan politik, penguatan independensi lokal, dan pemanfaatan media sosial yang bertanggung jawab, partisipasi masyarakat dalam Pilkada dapat meningkat secara *signifikan*, menciptakan demokrasi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Pilkada serentak 2024 memberikan pelajaran berharga bagi demokrasi Indonesia. Rendahnya partisipasi pemilih menunjukkan bahwa ada yang salah dalam pendekatan politik kita, termasuk dalam penggunaan strategi *endorsement* tokoh nasional.

Demokrasi lokal seharusnya menjadi ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang benar-benar memahami kebutuhan mereka, bukan ajang pembuktian kekuatan politik elit. Generasi muda memiliki peran kunci dalam mengembalikan esensi Pilkada.

Dengan memilih secara cerdas dan kritis, mereka dapat memastikan bahwa suara rakyat tetap menjadi fondasi utama demokrasi. *Endorsement* tokoh besar mungkin membawa perhatian sesaat, tetapi hanya partisipasi yang tulus dari masyarakat yang dapat membawa perubahan nyata.

(Januari Ayu Fridayani, Dosen Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma)

Editor: L Sukamta

SEBARKAN

Pos sebelumnya

Kementerian ATR/BPN Mengucapkan Selamat HUT Ke 53 KORPRI

Pos berikutnya

ICOR Indonesia Masih Tinggi, Tertinggal Dibanding Negara

Tetangga

